

## PENDIDIKAN BELA NEGARA DI RINDAM IV DIPONEGORO

### *STATE DEFENSE EDUCATION at RINDAM IV DIPONEGORO*

Rian Nurizka  
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar  
Universitas PGRI Yogyakarta  
[riannurizka30@gmail.com](mailto:riannurizka30@gmail.com)

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pendidikan bela negara di Rindam IV Diponegoro. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan setting di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam IV Diponegoro. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menentukan subjek penelitian secara purposive. Keabsahan data menggunakan teknik cross check. Analisis data menggunakan analisis data induktif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pendidikan bela negara merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan kesadaran dan pembentukan karakter warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, 2) Pendidikan bela negara berbeda dengan wajib militer, 3) Pendidikan bela negara dilakukan melalui jenis pelatihan berupa pendidikan dan pelatihan kewiraan, pembinaan karakter, pelatihan peningkatan nasionalisme, pelatihan kedisiplinan. 4) Hambatan terdiri dari faktor internal yaitu aspek fisiologis berupa masalah kesehatan dan fisik peserta bela negara, dan faktor eksternal yaitu lingkungan, cuaca, ketidaksesuaian jumlah peserta.

**Kata kunci:** pendidikan bela negara

#### Abstract

This research aims to analyze the implementation of of state defense education in Rindam IV Diponegoro. This research was qualitative with a case study approach were conducted at Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam IV Diponegoro. Data collection using interviews, observation, and documentation. The subject was determined purposively. The validity of the data used cross check technique. Analysis of data in this study used inductive data analysis. The results of this research show that: 1) state defense education is an effort made to provide awareness and character formation of citizens in the life of nation and state and believe Pancasila as state ideology, 2) Education defends the country differently from conscription, 3) State defense education is conducted through the type of training in the form of education and forensic training, character building, training of nationalism enhancement, discipline training, 4) Obstacles consist of internal factors is physiological aspects in the form of health and physical problems of state defenders, and external factors such as environment, weather, non-conformity of participants.

**Keywords:** *state defense education*

#### Pendahuluan

Kemajuan peradaban dunia pada era sekarang dipengaruhi dengan arus globalisasi yang masuk diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses globalisasi membawa kita menghadapi fenomena multifaset yang mengandung ekonomi, sosial, politik, budaya, dimensi agama dan hukum

(Santos, 2002, p.2). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aspek kehidupan suatu bangsa akan terpengaruh dengan fenomena globalisasi. Gidley (2001, p.1) mengemukakan bahwa globalisasi adalah serangkaian proses yang memberikan peluang dan ancaman.

Masuknya pengaruh global terhadap seluruh segi kehidupan bangsa menjadikan generasi muda semakin melupakan budaya dan nilai-nilai yang mencerminkan bangsa Indonesia. Perilaku remaja yang menghawatirkan seperti LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender), seks bebas yang dapat menyebabkan penyakit menular HIV/AIDS sudah sangat menghawatirkan dalam pergaulan generasi muda. Unayah dan Subarisman (2015, p.137) menyebutkan tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja sudah sangat bervariasi, mulai dari tawuran antarsekolah, perkelahian dalam sekolah, pencurian, perampokan, pembegalan, pemakai dan pengedar narkoba, hingga pemerkosaan bahkan sampai pada pembunuhan.

Pengaruh negatif yang muncul di kalangan generasi muda diakibatkan dari globalisasi, seperti yang dikemukakan Bourn (2008, p.52) "*globalisation impacts upon young people in complex ways and forces them to constantly re-think and revise their sense of identity and place within society. Young people's lives are constantly being influenced by new trends, be they cultural, technological or social*". Lemahnya kontrol pemerintah dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap masuknya budaya-budaya asing dapat menyebabkan tergesernya budaya lokal dan menimbulkan perubahan dari segi kehidupan terutama bagi generasi muda. Disinilah pentingnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat agar meminimalisir kerusakan-kerusakan yang terjadi baik dari sisi perilaku dan moral atau aspek kehidupan bangsa lainnya. Lembaga Pertahanan Nasional (2013, p.34) mengemukakan bahwa wawasan kebangsaan memberi nilai strategis tentang karakter bangsa, semangat kebersamaan, toleransi dan saling menghormati, rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan kesadaran hidup bernegara dan bermasyarakat dengan menjiwai dan berpegang teguh kepada Pancasila sebagai Dasar Negara.

Ditengah maraknya globalisme dengan segala atributnya, berupa modernisasi, keterbukaan, kemudahan dan kemajuan teknologi, merupakan sebuah tantangan bagi eksistensi nasionalisme. Peran kapital asing semakin besar dan ketergantungan negara terhadap pihak asing semakin menyudutkan peran negara di mata warga negara (Hendrastomo, 2007, p.10). Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan kepada

masayarakat sebagai bentuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Pembinaan tersebut dapat dilakukan salah satunya yaitu melalui pendidikan bela negara. Mengenai kewajiban masyarakat untuk membela negara telah diamanatkan dalam Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1) dan (2): (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Bela Negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara, (2). Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui: Pendidikan Kewarganegaraan, Pelatihan dasar Kemiliteran, Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan Pengabdian sesuai dengan profesi.

Subagyo (2015, p.5) memberikan secara detail tentang aturan yang tertuang dalam regulasi hukum tentang dasar hukum pelaksanaan bela negara yang ada di Indonesia sebagai berikut.

- 1) Tap MPR No. VI Tahun 1973 Tentang Konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
- 2) Undang-Undang No. 29 Tahun 1954 Tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
- 3) Undang-Undang No.20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
- 4) Tap MPR No. VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
- 5) Tap MPR No. VII Tahun 2000 Tentang Peranan TNI dan POLRI.
- 6) Amandemen UUD 1945 Pasal 30 dan Pasal 27 ayat 3
- 7) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Selain itu dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, disebutkan pada bagian kebijakan pembangunan pertahanan negara bahwa pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia pertahanan negara, serta penguatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1255/M/XII/2015 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016, menyebutkan pada bagian sasaran strategis pertahanan negara yaitu mewujudkan kesadaran bela negara bagi warga negara Indonesia. 1) Terbentuknya kader bela negara yang tangguh dalam mendukung pertahanan negara. 2) Terwujudnya sistem pembinaan kesadaran bela negara dengan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Pemda) dan komponen bangsa lainnya. 3) Terwujudnya SDM sebagai komponen pertahanan negara dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.

Landasan hukum tersebut menyiratkan bahwa seluruh warga negara Indonesia wajib bela negara dalam rangka menjaga dan mempertahankan negaranya. Semangat bela negara merupakan hal yang pokok sebagai wujud nasionalisme dan patriotisme dengan tidak memandang profesi individu baik itu guru, dokter, pejabat, kyai, santri, anak muda, orang tua, perempuan atau laki-laki, serta tidak memandang agama, ras, suku, etnis, semua harus siap dan mempunyai jiwa bela negara untuk mempertahankan Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Vahdat (2003, p.599) bahwa *“the establishment of a state deriving its power mainly from a strong ideological drive”* yang mempunyai pengertian bahwa pembentukan sebuah negara berdasarkan kekuatannya terutama dari ideologis. Diungkapkan juga oleh Facchini dan Melki (2011, p.3) bahwa *“ideology as a particular kind of beliefs is then included into culture”*. Dengan adanya kepercayaan terhadap sebuah ideologi, diharapkan ideologi Pancasila yang menjadi pijakan bangsa Indonesia menjadi pemersatu seluruh komponen bangsa serta menjadi budaya yang harus dijaga.

Bela negara itu sendiri adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, rela berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Widodo, 2011, p.19). John Mc Kinsey menambahkan bahwa bela negara merupakan wujud nyata dari

nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air yang tercermin dalam setiap warga negara sehingga mutlak dimiliki oleh warga negara agar supaya negaranya menjadi kuat (Subagyo, 2015, p.59).

Bela negara sering dikaitkan dengan wajib militer. Keduanya memang merupakan suatu tindakan sebagai wujud mencintai tanah air dengan mengorbankan jiwa raga demi mempertahankan negara. Wajib militer menurut Leander (2001) mempunyai tujuan utama yaitu selain menghasilkan rekrutan, wajib militer memberikan kontribusi terhadap pembentukan identitas nasional dengan membawa pemuda untuk tinggal dan bertugas bersama dalam membela negara dan akhirnya membangun rasa nasionalisme (Meyerle et. al, 2011, p.3). Sedangkan menurut Joo (2015, p.11) mengatakan bahwa wajib militer adalah warga negara berkewajiban untuk melaksanakan dinas militer dan memberikan pembelajaran untuk mendapatkan pelatihan psikologis yang lebih kuat dan lebih manipulatif di dalam militer.

Bela negara dengan wajib militer mempunyai kesamaan yaitu menciptakan warga negara yang memiliki dedikasi tinggi terhadap bangsanya terutama kaitannya dengan pertahanan negara. Dengan terciptanya masyarakat yang peduli terhadap negaranya, akan menciptakan situasi dan kondisi bangsa yang siap melawan dampak negatif dari perkembangan global. Melalui pendidikan bela negara, masyarakat akan diberikan materi-materi tentang kebangsaan yang dapat meningkatkan pemahaman dan kecintaan terhadap bangsa sendiri. Sehingga warga negara diharapkan dapat berkontribusi dalam segala bidang untuk dapat membantu negara mencapai tujuan bersama.

Dalam pendidikan bela negara juga mengajarkan tentang paham kebangsaan agar masyarakat mengetahui tentang paham yang dianut oleh bangsa Indonesia. Dimana Hendrastomo (2007, p.4) menyatakan bahwa *“paham kebangsaan adalah paham yang menyatakan loyalitas tertinggi terhadap masalah duniawi dari setiap warga, yang ditujukan kepada negara dan bangsa”*. Dari pernyataan ini dapat diartikan seluruh komponen bangsa wajib memahami tentang bangsanya. Melalui paham kebangsaan akan muncul jiwa-jiwa bangsa yang mempunyai sikap rela berkorban, aktif dalam setiap penyelenggaraan negara dan

meningkatkan kualitas masyarakat agar dapat bersaing di kancah internasional. Purwastuti, Kuntoro, dan Siswoyo (2017, p.33) mengatakan “... *every country has to strongly admit that the sustainable development of the country depends on the quality of the people*”.

Selain itu, bela negara sering dikaitkan dengan patriotisme dan nasionalisme. Menurut Kosterman dan Feshbach (1989) mengatakan “*patriotism will be defined as the “degree of love for and pride in one’s nation”*” (Ledoux & Marshall, 2010, p.1470). Pendapat lainnya dikemukakan Ben-Porath bahwa patriotisme adalah ikatan yang dirasakan dengan rekan senegarannya berdasarkan rasa senasib sebagai sesama warga yang didedikasikan untuk negara tersebut sebagai tujuan bersama (Blum, 2007, p.61). Sedangkan nasionalisme, Santiago (2012, p.12) mengungkapkan bahwa “*nationalism has not only facilitated social cohesion but has also met our ‘need’ for a belief in a meaningful world, particularly as regards basic issues such as death, humiliation and injustice*”. Jadi, dengan semangat patriotisme dan nasionalisme yang ditunjukkan warga negara akan berdampak pada suatu kesatuan bangsa yang mempunyai persamaan nilai dan rasa memiliki sesama warga negara untuk selalu bekerjasama dalam mewujudkan kehidupan negara yang sesuai dengan harapan bersama.

Pelaksanaan pendidikan bela negara sendiri dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan dan semangat bela negara kepada masyarakat. Seperti pada panduan program hibah pembelajaran bela negara yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti (2016, p.4) bahwa ragam dan kombinasi penyelenggaraan Pembelajaran Bela Negara amat bervariasi, antara lain melaksanakan pembelajaran melalui mata kuliah wajib umum yang capaian pembelajarannya mengacu pada butir-butir Bela Negara, *service learning* berupa Kuliah Kerja Nyata, pelatihan Bela Negara untuk memicu dan memacu *karakter kebangsaan*; melaksanakan diskusi lintas disiplin; menghadirkan dan diskusi dengan tokoh (sejarawan, budayawan, pemimpin bangsa dsb); atau menyelenggarakan olahraga dan atau seni untuk memacu sportivitas dan sensitivitas rasa.

Bela negara dapat dilakukan dengan cara fisik dan non fisik. Sutarman (2011, p.82)

menjelaskan bela negara fisik adalah bagi warga negara yang langsung maju perang dengan memanggul senjata, sedangkan bela negara non fisik adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara yang tidak langsung maju perang dengan angkat senjata, tetapi dilaksanakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa bela negara dengan cara fisik, masyarakat atau warga negara melakukan pembelaan terhadap negaranya dengan cara mengorbankan jiwa dan raganya demi kesatuan negara seperti mengangkat senjata melawan musuh negara untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Sedangkan beberapa contoh bentuk bela negara non fisik adalah seperti.

- 1) Taat dan patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku
- 2) Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara
- 3) Menanamkan kecintaan terhadap tanah air
- 4) Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara
- 5) Mengharumkan nama bangsa melalui prestasi
- 6) Membayar pajak untuk kepentingan bangsa dan negara.

Bela negara adalah suatu sikap atau perilaku warga negara yang mencintai negaranya dan berani mempertahankan negaranya dari segala ancaman dan gangguan baik dilakukan secara fisik maupun non-fisik dan setia menaati peraturan yang berlaku. Dalam kaitannya di Indonesia, warga negara Indonesia setia pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan selalu menjaga serta mempertahankan bangsa dari ancaman baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

Melihat kondisi global yang sudah sangat memanas dengan banyaknya peristiwa-peristiwa perang yang terjadi baik perang saudara seperti di Suriah, yang menyebabkan masyarakatnya terbelah menjadi dua kelompok antara pendukung pemerintahan Basar Al-Assyad dan yang anti-pemerintah. Selain itu kondisi seperti di negara Irak, Afganistan, Yaman, Mesir, Libya, Sudan, dan negara lainnya yang semakin mengancam kehidupan sebuah negara. Kasus-kasus tersebut cenderung terjadi antara warga negaranya sendiri yang kemudian menjadi ancaman

global dan mengikutsertakan negara lain. Peristiwa semacam ini yang harus segera diatasi untuk kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk terhadap suatu negara tidak terkecuali di Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan penduduk yang beranekaragam harus mempersiapkan sebaik-baiknya untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa seperti yang terjadi di negara lain. Oleh karena itu, pendidikan bela negara merupakan solusi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai salah satu cara pembentukan sikap kebangsaan warga negara.

Pendidikan bela negara tidak hanya diajarkan dalam dunia pendidikan formal, tetapi dapat diberikan melalui sebuah pelatihan khusus, kegiatan-kegiatan di masyarakat, komunitas masyarakat yang bertujuan membangun bangsa. Seperti pada penelitian ini, pendidikan bela negara dilaksanakan di Rindam IV Diponegoro yang merupakan satuan di bawah Kodam IV Diponegoro yang membawahi satuan pendidikan salah satunya Depo Pendidikan Bela Negara (Dodik Bela Negara). Dodik Bela Negara ini tidak hanya memberikan pendidikan kepada prajurit militer saja, tetapi memberikan pendidikan bela negara kepada masyarakat.

Untuk itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkap bagaimana program pendidikan bela negara yang dilaksanakan di Rindam IV Diponegoro dalam rangka membentuk warga negara agar memiliki karakter kebangsaan. Harapan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi teoritik guna pengembangan keilmuan tentang pendidikan bela negara di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sebagaimana yang ditawarkan oleh Creswell (2015). Studi kasus dalam penelitian ini, berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan bela negara bagi masyarakat di Dodik Bela Negara Rindam IV Diponegoro.

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari sampai April 2017 yang dilakukan di Dodik Bela Negara Rindam IV Diponegoro. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka peneliti memilih sumber data seperti yang ditawarkan Creswell (2015, p.218) yang terdiri dari level tempat, level peristiwa atau

proses, dan level partisipan. Pada level tempat, peneliti menentukan Dodik Bela Negara Rindam IV Diponegoro. Pada level peristiwa atau proses, peneliti memfokuskan penelitian pada pelaksanaan pendidikan bela negara bagi masyarakat sipil di Dodik Bela Negara Rindam IV Diponegoro.

Pada level partisipan, peneliti menentukan subjek penelitian melalui mekanisme *purposive*. Subjek penelitian yang dipilih merupakan orang-orang yang besinggungan langsung dengan pelaksanaan pendidikan bela negara di Dodik Bela Negara Rindam IV Diponegoro. Peneliti memilih subjek penelitian yaitu Peltu Eko Suyono sebagai *key informan*. Pertimbangan pemilihan *key informan* tersebut karena Peltu Eko Suyono sebagai Koordinator Pelatih Dodik Bela Negara. Untuk informan pendukung yaitu Letkol Infanteri Dodit Susanto, A.md selaku Komandan Dodik Bela Negara. Dan untuk informan dalam penelitian ini yaitu pelatih (instruktur) bela negara yaitu Kapten Infanteri Deng Sibeta yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Uropsjar, Kapten Infanteri Musyafa sebagai Komandan Kompi III, Lettu Infanteri Sumitra sebagai Komandan Pleton I. Pemilihan informan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Peltu Eko Suyono karena memiliki kapasitas dalam memberikan informasi terkait program pendidikan bela negara. Sedangkan untuk peserta bela negara Peltu Eko Suyono juga memberikan rekomendasi peserta bela negara dari resimen mahasiswa (Mahadipa Jawa Tengah Yudha XL) yaitu Danang Tria Kusuma dan Hanneli Risdianti yang dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan pendidikan bela negara.

Peneliti mengumpulkan data secara mandiri dengan mempelajari dokumen-dokumen, mengamati perilaku, dan mewawancarai para informan (Creswell, 2015, p.60). Untuk pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis data induktif dan melaksanakan tiga kegiatan secara berurutan

dari melakukan reduksi data, display/penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pendidikan Bela Negara di Dodik Bela Negara Rindam IV Diponegoro

Dodik Bela Negara merupakan satuan pelaksana operasional pendidikan dibawah Rindam IV Diponegoro dan sebagai pelaksana PTP Kementerian Pertahanan di Wilayah Kodam IV/Diponegoro sesuai program maupun non program.

Pelaksanaan pendidikan bela negara sebagai bagian dalam pembangunan manusia Indonesia yang ditujukan kepada masyarakat sipil guna mengantisipasi pengaruh negatif dari arus globalisasi berupa ancaman yang dapat mengancam pertahanan dan kedaulatan negara. Sejalan dengan yang diungkapkan Gidley (2001, p.1) bahwa globalisasi adalah serangkaian proses yang memberikan peluang dan ancaman. Upaya yang dilakukan ini untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat sipil supaya ikut berperan mempertahankan negara dari segala ancaman yang dihadapi baik secara militer maupun nonmiliter. Upaya pendidikan bela negara yang dilakukan tersebut merupakan sifat kesemestaan menurut Sutarnan (2011, p.81) yaitu salah satu sifat dari Perlawanan Rakyat Semesta yang mempunyai arti seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasikan diri guna menanggulangi setiap bentuk ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dalam wawancara yang dilakukan, Kapten Infanteri Deng Sibeta juga mengungkapkan bahwa “pendidikan bela negara untuk menghadapi ancaman militer atau non militer, karena perkembangan global yang penuh persaingan antar negara” (wawancara, 15 Maret 2017).

Pendidikan bela negara di Dodik Bela Negara Rindam IV Diponegoro dilaksanakan dengan jenis pelatihan menyesuaikan usia, profesi atau instansi yang melaksanakan pendidikan bela negara. Jenis pelatihan pendidikan bela negara dapat berupa pendidikan dan pelatihan kewiraan, pembinaan karakter, pendidikan dasar menwa, pelatihan peningkatan nasionalisme, pelatihan kedisiplinan atau kesamaptaan. Seperti pada panduan program hibah pembelajaran bela negara yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Kemenristek Dikti (2016, p.4) bahwa ragam dan kombinasi penyelenggaraan Pembelajaran Bela Negara amat bervariasi, antara lain melaksanakan pembelajaran melalui mata kuliah wajib umum yang capaian pembelajarannya mengacu pada butir-butir Bela Negara, *service learning* berupa Kuliah Kerja Nyata, pelatihan Bela Negara untuk memicu dan memacu *karakter kebangsaan*; melaksanakan diskusi lintas disiplin; menghadirkan dan diskusi dengan tokoh (sejarawan, budayawan, pemimpin bangsa dsb); atau menyelenggarakan olahraga dan atau seni untuk memacu sportivitas dan sensitivitas rasa.

Pelaksanaan pendidikan bela negara di Dodik Bela Negara mempunyai tujuan untuk menanamkan sikap patriotisme, nasionalisme, kedisiplinan, kerjasama, kepemimpinan, karakter, cinta tanah air, dan kemampuan awal bela negara kepada peserta didik yang dapat berguna dalam kemajuan bangsa. Seperti yang ungkapkan pada seminar yang dipresentasikan melalui FGD di Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI tahun 2014, Rosyada memberikan saran tentang model pembinaan bela negara sebagai karakter bangsa, salah satunya muatan pembinaan kesadaran bela negara. Tema-tema yang paling penting adalah: religiusitas, cinta tanah air dan patriotisme, jujur, mandiri, pemberani, mandiri, bertanggung jawab, disiplin dan pekerja keras, toleran, demokratis, *respect* dan menghargai perbedaan, bertanggung jawab, peduli sosial, peduli lingkungan, kreatif, inovatif, dan bisa bekerjasama dengan orang lain.

Nilai-nilai karakter yang di ajarkan melalui pendidikan bela negara tersebut sebagai bentuk paham kebangsaan dan wujud kebanggaan terhadap negara yang harus dimiliki peserta didik. Hendrastomo (2007, p.4) menyatakan bahwa “paham kebangsaan adalah paham yang menyatakan loyalitas tertinggi terhadap masalah duniawi dari setiap warga, yang ditujukan kepada negara dan bangsa”.

Upaya bela negara sendiri tidak hanya di serahkan sepenuhnya kepada aparat militer sebagai penjaga kemanan dan pertahanan negara, tetapi juga diwajibkan kepada seluruh warga negara. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 ayat (1), berbunyi: “setiap-tiap warga negara berhak dan

wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara”. Pelaksanaan pendidikan bela negara di Dodik Bela Negara Rindam IV Diponegoro tidak hanya diberikan kepada prajurit TNI saja, tetapi juga kepada masyarakat sipil seperti karyawan perusahaan, mahasiswa, anak sekolah, dinas sosial, dan pegawai negeri sipil. Seperti yang diungkapkan Oommen (2003, p.259) tentang negara *“the idea of nation is such an electrifying one that people of one nation are willing to murder the people of other nations for self-preservation and /or prosperity”*.

Bela negara sering disebut sama dengan wajib militer seperti di negara-negara lain. Dari hasil temuan penelitian, pelaksanaan pendidikan bela negara yang dilakukan di Dodik Bela Negara Rindam IV Diponegoro kepada masyarakat sipil tidak seperti dengan wajib militer dibuktikan dengan pelaksanaan yang tidak cenderung seperti pendidikan militer, tidak bertujuan sebagai wadah untuk perekrutan, hanya saja pendidikan tersebut sebatas pengenalan-pengenalan senjata khususnya untuk peserta dari resimen mahasiswa. Sementara untuk anak sekolah, mahasiswa, karyawan perusahaan, pegawai negeri sipil sebatas memberikan pemahaman kebangsaan. Seperti yang diungkapkan Joo (2015, p.11) tentang wajib militer adalah warga negara berkewajiban untuk melaksanakan dinas militer dan memberikan pembelajaran untuk mendapatkan pelatihan psikologis yang lebih kuat dan lebih manipulatif di dalam militer. Jadi pendidikan bela negara tidak serta merta sama dengan wajib militer, tetapi pendidikan bela negara untuk membentuk karakter warga negara agar mempunyai sikap kebangsaan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Selain itu untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan nasional dalam rangka mendukung pemberdayaan potensi wilayah pertahanan.

Pendidikan bela negara yang diberikan kepada masyarakat sipil di Dodik IV Diponegoro mengajarkan nilai toleransi yang ditunjukkan dengan tidak membedakan latar belakang antar peserta didik, nilai kerja keras dengan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh seperti saat melakukan latihan fisik berupa halang rintang, nilai demokratis yang ditampilkan saat diskusi dalam pembelajaran, semangat kebangsaan dengan pembelajaran yang diajarkan pelatih

untuk selalu setia dan membela kepentingan bangsa, nilai religius dengan melakukan ibadah di masjid Nuruul Falaah yang berada di kompleks Dodik Bela Negara, nilai tanggung jawab dengan melaksanakan tugas yang diberikan pelatih saat pembelajaran dan di luar pembelajaran, kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan. Penanaman nilai-nilai tersebut dapat berguna bagi kemajuan bangsa dari semua aspek kehidupan dan dapat dijadikan sebagai bentuk kepribadian dan kekuatan bangsa yang dilandasi dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi atau pedoman hidup bangsa Indonesia. Vahdat (2003, p.599) bahwa *“the establishment of a state deriving its power mainly from a strong ideological drive”*.

Dalam pelaksanaan pendidikan bela negara juga terdapat perangkat pembelajaran yang digunakan, meliputi kurikulum, RPP, jadwal pendidikan, materi pembelajaran, dan pedoman penilaian. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak seluruh perangkat pembelajaran tersebut disiapkan dengan baik terlihat dari masih kurangnya perangkat pembelajaran yang tidak disiapkan seperti RPP dan pedoman penilaian dalam setiap pelaksanaan pendidikan bela negara. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan bela negara meliputi ceramah, diskusi, dan tanya jawab untuk pembelajaran teori yang dilaksanakan di dalam kelas, sedangkan untuk pembelajaran di luar kelas berupa pelajaran praktek menggunakan aplikasi atau penerapan dari teori yang telah diberikan kepada kader bela negara di kelas.

Pelaksanaan pendidikan bela negara yang dilaksanakan di Dodik Bela Negara Rindam IV Diponegoro yaitu melalui pembelajaran di kelas dengan memberikan materi-materi terkait bela negara seperti pendidikan pendahuluan bela negara, materi tentang empat konsensus kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika), tata upacara sipil, kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, komunisme dan radikalisme, wawasan kebangsaan, perang modern, pembinaan dan penyuluhan narkoba dan psikotropika, kedisiplinan, kepemimpinan, peran pemuda dalam pembangunan nasional. Materi-materi tersebut menunjukkan suatu upaya dari pendidikan bela negara untuk memberikan pemahaman kebangsaan kepada peserta bela negara. Seperti pada penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Pembelajaran di luar kelas dengan memberikan latihan fisik kepada peserta bela negara. Bela negara dapat dilakukan dengan cara fisik dan non fisik. Sutarman (2011, p.82) menjelaskan tentang hal tersebut sebagai berikut.

Bela negara fisik adalah bagi warga negara yang langsung maju perang dengan memanggul senjata, sedangkan bela negara non fisik adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara yang tidak langsung maju perang dengan angkat senjata, tetapi dilaksanakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing.

Dalam pelaksanaan pendidikan bela negara di Dodik Bela Negara Rindam IV Diponegoro terkait pembelajaran di luar kelas atau latihan fisik yang diberikan seperti PBB, tata upacara bendera, *survival*, caraka malam, pratangkas, *mountaineering*, lintas medan, halang rintang, dan *outbound*. Kegiatan-kegiatan tersebut bukan berarti disiapkan untuk perang dengan memanggul senjata seperti wajib militer, tetapi pembelajaran fisik pada pendidikan bela negara lebih pada mengutamakan solidaritas, keterampilan, dan kerjasama tim sebagai wujud dari menghargai perbedaan dalam kehidupan dan mementingkan kelompok dengan tidak membeda-bedakan antar sesama anggota.

Sistem penilaian yang dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan bela negara di Dodik Bela Negara tidak berjalan seperti aturan yang ada, tetapi mereka melakukan penilaian terhadap peserta bela negara hanya menggunakan pengamatan, partisipasi, dan melaksanakan perintah dari pelatih serta perkembangan peserta dalam mengikuti pendidikan bela negara. Nuriyah (2014, p.79) mengungkapkan penilaian harus beracuan kriteria, yaitu penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan bela negara yaitu masalah kesehatan dan fisik peserta bela negara,

ketidaksesuaian jumlah peserta bela negara dengan proposal yang disepakati sehingga mengganggu proses belajar terutama untuk fasilitas pendidikan, masalah lingkungan, dan cuaca. Sedangkan faktor pendukungnya adalah pelatih yang sudah berpengalaman dan sesuai *basic* dalam materi yang diajarkan, sarana dan prasarana yang sudah cukup baik, kepercayaan pengguna terhadap pendidikan di Dodik Bela Negara, lingkungan Dodik Bela Negara, dan pengawasan yang dilakukan penyelenggara. Seperti yang diungkapkan Ismail (2016, p.37) terkait faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar yaitu faktor internal yang terbagi menjadi aspek fisiologis dan psikologis, dan faktor eksternal. Hambatan dari aspek fisiologis dalam pendidikan bela negara yaitu masalah kesehatan dan fisik peserta bela negara. Sedangkan untuk faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah lingkungan, cuaca, ketidaksesuaian jumlah peserta.

Solusi dari hambatan dalam pelaksanaan pendidikan bela negara yaitu peserta bela negara dianjurkan melakukan pemeriksaan awal terkait kesehatan dan kondisi fisik, membawa kartu BPJS barangkali ada masalah kesehatan atau cedera dalam pelaksanaan pendidikan dan berkomunikasi dengan instansi yang mengikuti pendidikan bela negara, memberikan bimbingan yang intens kepada peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus, berkoordinasi lebih detail tentang jumlah peserta dengan instansi terkait, meminta bantuan kepada kementerian pertahanan untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan yang sudah tidak layak pakai tersebut.

## Simpulan dan Saran

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan bela negara merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memberikan kesadaran dan pembentukan karakter warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta meyakini Pancasila sebagai ideologi negara dan pedoman hidup bangsa dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam pendidikan bela negara sebagai pembentukan sikap kepada peserta bela negara diantaranya: patriotisme, nasionalisme, kedisiplinan, kerjasama, kepemimpinan, karakter, cinta tanah air, dan kemampuan awal bela negara kepada peserta



didik yang dapat berguna dalam kemajuan bangsa.

Pendidikan bela negara berbeda dengan wajib militer. Dalam pelaksanaan pendidikan bela negara yang dilakukan di Dodik Bela Negara Rindam IV Diponegoro pelaksanaan yang tidak cenderung seperti pendidikan militer, tidak bertujuan sebagai wadah untuk perekrutan, tetapi pendidikan bela negara untuk membentuk karakter warga negara agar mempunyai sikap dan karakter kebangsaan. Selain itu untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan nasional dalam rangka mendukung pemberdayaan potensi wilayah pertahanan.

Pelaksanaan pendidikan bela negara yang dilaksanakan di Dodik Bela Negara Rindam IV Diponegoro yaitu melalui jenis pelatihan berupa pendidikan dan pelatihan kewiraan, pembinaan karakter, pendidikan dasar menwa, pelatihan peningkatan nasionalisme, pelatihan kedisiplinan atau kesamaptaan. Pendidikan tersebut dilakukan melalui pembelajaran di kelas dengan memberikan materi-materi terkait upaya bela negara dan melalui pembelajaran di luar kelas atau latihan fisik dengan bentuk-bentuk kegiatan untuk mambangun solidaritas, keterampilan, jiwa korsa, dan kerjasama tim.

Hambatan dalam pelaksanaan pendidikan bela negara berupa hambatan dari aspek fisiologis dalam pendidikan bela negara yaitu masalah kesehatan dan fisik peserta bela negara. Sedangkan untuk faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah lingkungan, cuaca, ketidaksesuaian jumlah peserta. Solusi yang diberikan melakukan pemeriksaan kesehatan, membawa kartu BPJS apabila sewaktu-waktu mengalami cedera dalam latihan, memberikan bimbingan yang intens kepada peserta bela negara yang mempunyai kebutuhan khusus.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bela negara merupakan suatu usaha yang harus selalu dilakukan oleh negara untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat. Hal ini karena ancaman-ancaman global dapat mengakibatkan dampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar kualitas dan pelayanan dalam pendidikan bela negara agar selalu ditingkatkan baik dari fasilitas pendidikan serta perlengkapan pendidikan sebagai sarana penting dalam proses pendidikan bela negara.

## Daftar Pustaka

- Blum, Lawrence. (2007). Best tradition patriotism a commentary on Miller, Wingo, and Ben-Porath. *Theory and Research Education*, Vol.5(1), 61-68.
- Bourn, Douglas. (2008). Young people, identity and living in a global society. *Policy & Practice: A Development Education Review*, Vol. 7, Autumn, 48-61.
- Creswell, John W. (2015). Penelitian kualitatif & desain riset: memilih diantara lima pendekatan (3<sup>rd</sup> eds). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Facchini, Francois., & Melki, Mickael. (2011). *Ideology and cultural change*. SEMINAR SEPIO JUNE 21, MSE (PARIS 1, FRANCE) and Association for the Study of Religion, Economics & Culture, ASREC Annual Meeting, April 7-10, 2011 Hyatt Regency, Crystal City (Washington DC).
- Gidley, Jennifer. (2001). Globalization and its impact on youth. *Journal of Futures Studies*, Vol 6, No 1, 89-106.
- Hendrastomo, Grendi. (2007). Nasionalisme vs globalisasi 'hilangnya' semangat kebangsaan dalam peradaban modern. *Dimensia*, Volume I, No.1, 1-11.
- Ismail. (2016). Diagnosis kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran aktif di sekolah. *Jurnal Edukasi*, Volume 2, Nomor 1, 30-43.
- Joo, Hyo Sung. (2015). South Korean men and the military: the influence of conscription on the political behavior of South Korean males. *CMC Senior Theses*. Paper 1048.
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (2016). *Panduan program hibah pembelajaran bela negara*. Jakarta: Direktorat Pembelajaran.
- Ledoux, Michael W & Marshall, Thomas. (2010). Can we teach patriotism in

- schools ?. *Educational Horizons*, 146-150.
- Lembaga Pertahanan Nasional RI. (2013). Aktualisasi Semangat Kebangkitan Nasional guna Memantapkan Wawasan Kebangsaan Lintas Generasi dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 15, 30-40.
- Menteri Pertahanan RI. (2015). *Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/1255 / M / XII / 2015, tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016*.
- Meyerle, Jerry., Samanarayake, Nilanthi., Markowitz, Mike., et al. (2011). *Concriptions in the Afghan army*. CNA Analysis & Solution.
- Nuriyah, Nunung. (2014). Evaluasi pembelajaran: sebuah kajian teori. *Jurnal Edueksos*, Vol. III, No.1, 73-86.
- Oommen, T.K. (2003). Demystifying the nation and nationalism. *India International Centre Quarterly*, Vol. 29, No. 3/4, 259-274.
- Presiden. (2015). *Peraturan Presiden Nomor 97, Tahun 2015, tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019*.
- Purwastuti, Lusila Andriani., Kuntoro, Sodik A., & Siswoyo, Dwi. (2017). National education ideology as the orientation of the school culture development policy at SMA N 1 and SMA N 3 Yogyakarta. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Volume 5, No 1, 32-41.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 3, Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara*.
- Rosyada, Dede. (April 2014). *Pembinaan kesadaran bela negara dalam rangka membangun karakter bangsa*. Makalah disajikan pada Focus Group Discussion di Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI.
- Santiago, Jose. (2012). Secularisation and nationalism: a critical review. *Sosial Compass*, 59 (1), 3-20.
- Santos, Boaventura de Sousa. (2002). *The processes of globalisation*. Diambil pada tanggal 25 November dari <http://www.eurozine.com/the-processes-of-globalisation/>.
- Sutarman. (2011). Persepsi dan pengertian pembelaan negara berdasarkan UUD 1945 (amandemen). *Magistra*, No. 75 Th. XXIII Maret 2011.
- Subagyo, Agus. (2015). *Bela negara peluang dan tantangan di era globalisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Unayah, Nunung & Sabarisman, Muslim. (2015). Fenomena remaja dan kriminalitas. *Sosio Informa* Vol.1, No.2, 121-140.
- Vahdat, Farzin. (2003). Post-revolutionary islamic discourses on modernity in Iran: expansion and contraction of human subjectivity. *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 35, No. 4, 599-631.
- Widodo, Suwarno. (2011). Implementasi bela negara untuk mewujudkan nasionalisme. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume I, No 1, 18-31.